BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 288 TAHUN 2023
TENTANG
ADMIN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terkait dengan pengelolaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten dipandang perlu menunjuk Nama Admin Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap Penunjuk Admin Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6856):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Admin Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi pagu Anggaran Belanja Perangkat Daerah dan kegiatan yang pengadaan barang dan jasanya dilakukan melalui proses tender, non tender dan swkelola;
b. mengkompilasi rencana target penyerapan anggaran/ realisasi keuangan (*disbursement plan*) bulanan terhadap masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
c. mengkompilasi target dan realisasi fisik terhadap masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
d. mengunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di awal tahun berjalan ke alamat http://sismonkab.natunakab.go.id/;
e. mengkompilasi laporan realisasi belanja Perangkat Daerah secara bulanan;
f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan Perangkat Daerah secara bulanan;
g. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai dan sudah proses tender, non tender, pelaksanaan kontrak dan *provisional hard over*/PHO dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
h. melakukan koordinasi dengan PPTK dan PPK untuk menyampaikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan terhadap progres pelaksanaan pekerjaan belanja modal konstruksi dan belanja modal non kontruksi pada menu *monevonline* SISMONKAB; dan
i. mengunggah ke dalam SISMONKAB data pada huruf e, f dan g setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 283 TAHUN 2023
TENTANG
ADMIN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ADMIN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA ADMIN	NIP	PANGKAT/GOL	NO HP	OPD
1	NASRIA, S.Si	19790108 200903 1 005	Penata Tk.I / III.d	082170784512	DISDIKBUD
2	RANDY PRASETYA	19860324 200903 1 003	Penata Muda Tk.I/III.b	081381214264	DINKES
3	NUR DENIANA, S.IP	19800704 200604 2 030	Penata / III.c	081364745499	PUPR
4	NUR APRIYANTI, ST	19870211 202012 2 005	Ahli Pertama / III.a	082173739332	DISPERKIMTAN
5	JULI EFENDI	19880725 202012 1 009	Penata Muda / III.a	082288275940	SATPOL PP DAN LINMAS
6	ISPAR, SE	19811225 200604 1 010	Penata Muda / III.a	085263656280	DAMKAR DAN PENYELAMATAN
7	RASLINAWATI	19810422 200604 2 027	Pengatur Tk. I / II.d	081363104230	DINSOS
8	AMRAN, A. Md	19780711 201001 1 007	Penata Muda Tk. I / III.b	085263543899	DISNAKERTRANS
9	NELLY AGUSFINA, S.A.P	19810831 200902 2 003	Penata / III.c	081372500600	DP3AP2KB
10	SUBANDI	19820425 200701 1 006	Penata Muda / III.a	081372490326	DKPP

11	ADE PRAYITNO, SE	19800923 200502 1 006	Penata Tk.I / III.d	081277554551	DLH
12	UTAMI, S.Sos	19750121 200903 2 004	Penata Tk.I / III.d	082253279093	DISDUKCAPIL
13	ADE KURNIAWAN, SE	19810905 201403 1 002	Penata / III.c	082283938488	DPMD
14	SYARIFAH AMINAH, SE	19830628 200902 2 001	Penata Tk.I / III.d	081277210312	DISHUB
15	MUSLIHAWATI, S.IP	19790821 200312 2 014	Penata/ III.c	081277145565	DISKOMINFO
16	ZARUDDIN, SE	19720403 200003 1 009	Penata Tk.I / III.d	081277701550	DPMPTSP
17	BAHARUN	19840105 201001 1 003	Pengatur Tk. I / II.d	081374426840	DISPORA
18	MEGA CHARISMA PUTRI, A.Md	19860402 201001 2 016	Penata Muda Tk.I/III.b	081276301986	DISPERPUSIP
19	HABIBI	19800914 200012 1 002	Penata Muda Tk.I / III.b	088708264085	DISPERIKANAN
20	DAHNIAR, S. IP	19720713 200312 2 003	Penata Muda TK.I / III.b	081372414673	DINAS PARIWISATA
21	ANISAH, S.IP	19790709 200701 2 017	Penata / III.c	081364634787	DISPERINDAGKOP
22	CHRISTIANTI ENDARTI, SE	19841201 201403 2 004	Penata Muda Tk.I/III.b	081267369514	SEKRETARIAT DAERAH
23	RINO ARDIANSYAH, S.IP	19840202 200604 1 003	Penata Muda Tk.I / III.b	081276895777	SEKRETARIAT DPRD
24	PIRDANI, S.Sos	19890912 201903 1 007	Penata Muda / III.a	082357908213	BP3D
25	M.FARID HEIKEL, S.IP	19790628 200604 1 016	Penata / III.c	081270392298	BPKPD
26	ZULKARNAIN, A.Md	19801030 200012 1 004	Penata Muda Tk.I / III.b	082170088972	BKPSDM
27	NUR HASANAH IBRAHIM, ST	19931026 202012 2 025	Penata Muda / III.a	082169017329	BPPD
28	WANDI PUTRA, SE	19780421 200604 1 023	Penata Muda/ III.a	081270710333	INSPEKTORAT DAERAH
29	SIWAN, S.A.P	19811115 200012 1 001	Penata Muda / III.a	081372151730	BAKESBANGPOL
30	MARMI, A.Md	19820224 200604 2 024	Pengatur Tk. I / II.d	081275948066	BPBD

31	SUHARNO, SE	19820310 200012 1 004	Penata Muda / III.a	081364345449	KEC. PULAU TIGA
32	MUKORROBIN, S.Pd	19751211 200604 1 018	Penata / III.c	082172373784	KEC. PULAU TIGA BARAT
33	DILLA SONYA, S.STP	19940614 201609 2 001	Penata / III.c	0822147121 14	KEC. BUNG TIMUR
34	EMY JULIANA, S.IP	19750709 200312 2 013	Penata / III.c	085272660878	KEC. SERASAN TIMUR
35	YANI	19780710 201408 2 004	Pengatur / II.b	0823908201 28	KEC. SERASAN
36	DRESNI YULIA, S.Sos	19881217 202203 2 001	Penata Muda / III.a	081276344303	KEC. MIDAI
37	JAMHOR, S.Pd.SD	19791005 200604 1 021	Penata Muda / III.a	085270300440	KEC. SUBI
38	FEBRI FERNANDEZ, A.Md	19880203 201001 1 003	Penata Muda Tk.I / III.b	082283752293	KEC. BUNG. BARAT
39	ANISAH, S.IP	19790709 200701 2 017	Penata / III.c	081364634787	KEC. BUNG. UTARA
40	NEDI ALOT	19831005 200903 1 005	Penata / III.c	081270411170	KEC. PULAU LAUT
41	YA'KUB	19821129 200906 1 001	Pengatur / II.c	085307730031	KEC. BUNG TIMUR LAUT
42	RATNA, SE.SY	19710221 200212 2 003	Penata Muda Tk.I/III.b	081276795287	KEC. BUNG SELATAN
43	ZULKIPLI,S.IP	19780707 200012 1 004	Penata / III.c	082383878758	KEC. SUAK MIDAI
44	AKHYAR, S.IP	19690817 198908 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b	085264849994	KEC. BUNG BATUBI
45	AMIRUDIN, S.Pd	19841210 200903 1 004	Penata Tk. I / III.d	082170686921	KEC. BUNG TENGAH
46	EVI NOVIANTI, A.Md	19860811 201403 2 002	Penata Muda / III.a	081387770973	KEC. PULAU PANJANG
47	ASMI JULIADI	19730720 200212 1 005	Penata Muda Tk.I/III.b	082256511783	KEC. PULAU SELUAN

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI